

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Busroh, F. F. (2015). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat*. Lex Librum.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feist, J., & J. Feist, G. (2009). *Theories of Personality: 7th Edition*. New York: McGraw Hill.
- Hafid, J. (2001). *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*. Bogor: Pustaka Latin.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Malik, I., Wijardjo, B., Fauzi, N., & Royo, A. (2003). *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed)*. United States of America: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Press, T. P. (2015). *OTODA (Otonomi Daerah UU No 232 Th 2014)*. Permata Press.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijardjo, B., & Perdana, H. (2001). *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*. PT. Sembrani Aksara Nusantara.

Jurnal

- Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria Arahkan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Jakarta.
- Karina, N., Silviana, A., & Triyono. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) Dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA nOMOR: 1097K/pDT/2013). *Diponegoro Law Review*.
- Negara, Y. C., Tippe, S., & Wahyudi, B. (2019). Resoludi Konflik Lahan Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*.
- Supriyanto. (2008). Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Dokumen

- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan.
- Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. (2010). Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. (2010). DKI Jakarta, Republik Indonesia.
- Surat P3MU, No. 12/P3MU/01/2009 (Januari 20, 2009).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. (2002). Jakarta, DKI Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (1999). Republik Indonesia.

Website

Djunaidy, M. (2013, Desember 31). *Sengeta 13 Tahun, Warga Kertajek Dapatkan Tanahnya*. Retrieved from tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/541331/sengketa-13-tahun-warga-kertajek-dapatkan-tanahnya>